

1752577518

 Mindanao State University - Marawi Campus

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:104569260

Submission Date

Jul 15, 2025, 11:05 AM UTC

Download Date

Jul 15, 2025, 11:06 AM UTC

File Name

FINAL NASKAH 17 Juni - Hilda, dkk.docx

File Size

59.6 KB

14 Pages

4,141 Words

28,591 Characters

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 12%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 19% Internet sources
- 12% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	eprints.untirta.ac.id	4%
2	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
3	Publication	Ra, M. Nashiroh Nasyir. "Rekonstruksi Regulasi Tenaga Nazhir Wakaf Dalam Peni...	<1%
4	Internet	fh.unram.ac.id	<1%
5	Internet	ppid.serangkota.go.id	<1%
6	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
7	Internet	bapemperdadprd.meranginkab.go.id	<1%
8	Internet	journal.widyakarya.ac.id	<1%
9	Internet	www.scribd.com	<1%
10	Publication	Veryudha Eka P, Lutfi Wahyuni, Yunitia Fitria. "EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KESEHA...	<1%
11	Internet	infopublik.id	<1%

12	Internet	ejurnal.biges.ac.id	<1%
13	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
14	Submitted works	Universitas Negeri Jakarta on 2023-10-16	<1%
15	Internet	artikelpendidikan.id	<1%
16	Internet	tobapos.co	<1%
17	Internet	hukum.journalpustakacendekia.com	<1%
18	Internet	journal.appti.org	<1%
19	Internet	repository.ipb.ac.id	<1%
20	Internet	pustakadata.semarangkota.go.id	<1%
21	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
22	Internet	mail.jptam.org	<1%
23	Publication	Fariz Fariz. "Quality Improvement Strategy for Strengthening Higher Education C...	<1%
24	Publication	Piranti Gandesworo, Arie Hendra Saputro. "Pengaruh Keseimbangan Kehidupan ...	<1%
25	Submitted works	Universitas PGRI Semarang on 2023-11-14	<1%

26	Internet	ppjp.ulm.ac.id	<1%
27	Publication	Heriyansyah, Muhamad. "Penerapan Asas Kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Unda...	<1%
28	Publication	Listyawati, Peni Rinda. "Rekonstruksi Regulasi Corporate Social Responsibility Be...	<1%
29	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2018-09-06	<1%
30	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
31	Submitted works	Universitas Negeri Makassar on 2013-06-17	<1%
32	Submitted works	Universitas Pendidikan Indonesia on 2012-10-09	<1%
33	Publication	Yuyun Yuniarsih. "Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuan...	<1%
34	Internet	ajatappareng.online	<1%
35	Internet	ipa.fmipa.um.ac.id	<1%
36	Internet	www.bantenraya.com	<1%
37	Publication	Adi Rahadian. "HAORNAS: Gerakan Sport for All Kunci Keberhasilan Olahraga Ind...	<1%
38	Submitted works	Bellevue Public School on 2021-06-25	<1%
39	Publication	Dewatana, Hernawan. "Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyebaran I...	<1%

40	Publication	Rangga Okta Budianto, Lathifa Prima Ghanistyana. "Peran Komunikasi Politik dal...	<1%
41	Publication	Sohimah, Evy Apriani, Yogi andhi Lestari. "Pelatihan Pencegahan Dan Deteksi Kel...	<1%
42	Submitted works	Surabaya University on 2014-07-07	<1%
43	Submitted works	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2021-07-28	<1%
44	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
45	Internet	es.scribd.com	<1%
46	Internet	inixindojogja.com	<1%
47	Internet	kuliahtantan.blogspot.com	<1%
48	Internet	media.neliti.com	<1%
49	Internet	pt.scribd.com	<1%
50	Internet	scienceon.kisti.re.kr	<1%
51	Internet	vdocuments.site	<1%
52	Internet	www.jogloabang.com	<1%
53	Internet	www.researchgate.net	<1%

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Hilda Sri Ita Marlinda

Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Mohamad Faesyehuddin

Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Ahmad Rayhan

Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Alamat: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163

Korespondensi penulis: hildastard@gmail.com

Abstract. *The achievement of sports accomplishments is inseparable from the support provided by the government and sports institutions. The welfare of athletes is the full responsibility of the government. The source of sports funding used to meet the welfare of outstanding athletes comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget set in the Provincial Standard Unit Price of Banten. Identification of the problem in this research is: 1). What is the responsibility of the local government in fulfilling the welfare of outstanding athletes in Banten Province? 2). What are the obstacles faced by the regional government of Banten province in fulfilling the welfare of outstanding athletes in Banten province and what solutions can be implemented? This research uses the theory of responsibility and the theory of welfare as analytical tools, and the method used in this research is the empirical legal method with qualitative research specifications. This research uses the theory of responsibility and the theory of welfare as an analytical tool, and the type of method used in this research is the empirical legal method with qualitative research specifications. From the results of this research, it is stated that the local government has full responsibility in supporting the welfare of athletes. These responsibilities encompass various aspects, ranging from providing sports facilities to offering appropriate training programs and providing financial and non-financial support to athletes. However, in carrying out its duties, the local government of Banten Province still faces several obstacles, such as the minimal budget allocation for sports, which causes inconsistency in providing incentives to outstanding athletes. In addition, the lack of coordination between institutions also worsens the situation, causing the programs to not run optimally, and lastly, the Banten provincial local government has not yet had a special doctor for athletes, commonly known as a sports therapist. Therefore, the local government needs to ensure that existing regulations are enforced consistently and have a clear oversight mechanism.*

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Hilda Sari Ita Marlinda, hildastard@gmail.com

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Keywords : *Athlete Welfare, Sports Awards, Sports Policy*

Abstrak. Pencapaian prestasi olahraga tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan kelembagaan olahraga. Kesejahteraan atlet merupakan tanggung jawab penuh pemerintah. Sumber pendanaan keolahragaan yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan atlet berprestasi berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Provinsi Banten. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan kesejahteraan atlet berprestasi di provinsi banten? 2). Apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah provinsi banten dalam memenuhi kesejahteraan atlet berprestasi di provinsi banten dan bagaimana Solusi yang dapat diterapkan?. Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab dan teori kesejahteraan sebagai pisau analisis dan jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode hukum empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab penuh dalam mendukung kesejahteraan atlet. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari menyediakan fasilitas olahraga hingga menyediakan program Latihan yang tepat serta memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada atlet. Namun, dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah provinsi banten masih mengalami beberapa hambatan, seperti minimnya alokasi anggaran yang untuk bidang keolahragaan yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam memberikan insentif kepada atlet berprestasi. Selain itu kurangnya koordinasi antar Lembaga juga memperburuk situasi yang menyebabkan program tidak berjalan secara optimal dan yang terakhir pemerintah daerah provinsi banten belum mempunyai dokter khusus atlet atau biasa disebut *sport therapis*. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peraturan yang ada ditegakkan secara konsisten dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Kata kunci: Kebijakan Keolahragaan, Kesejahteraan Atlet, Penghargaan Olahraga

LATAR BELAKANG

Tujuan negara republik Indonesia tercantum dalam Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni bahwa negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(Soemarsono, 2017) Dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional di bidang olahraga dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, bertahap dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai dan meningkatkan kesejahteraan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjelaskan, olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran,

raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.

Atlet Berprestasi adalah olahragawan yang dipilih induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pelatihan nasional, dimana dalam prosesnya atlet di dukung oleh organisasi olahraga. Organisasi olahraga berperan sebagai fondasi dalam mengembangkan bakat atlet. Mereka menyediakan pelatihan yang terstruktur, fasilitas modern, dan akses kepada pelatih yang berpengalaman. Pencapaian prestasi olahraga tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan kelembagaan olahraga. Pemerintah harus sadar betapa pentingnya untuk meningkatkan fasilitas olahraga, menyediakan pelatihan yang berkualitas, dan memastikan kesehatan serta kesejahteraan atlet.

Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan, sehingga pemerintah berperan aktif dalam memberi dukungan dan penghargaan bagi atlet berprestasi sebagai bagian dari upaya pemenuhan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Wicaksono, 2022) Namun, minimnya perhatian Pemerintah terhadap atlet menjadi sebuah permasalahan, terutama perihal pemberian penghargaan yang tidak sesuai dengan janji dan pelaksanaannya yang masih kurang merata, banyak atlet dan mantan atlet berprestasi yang belum mendapat hak-haknya. (Zufri dan Jaluanto, 2018)

Banten merupakan provinsi yang terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya. Banten memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas dan berbakat di berbagai bidang. Banten unggul tidak hanya di bidang kebudayaan tetapi juga di bidang olahraga. Atlet provinsi banten yang berprestasi sudah dijanjikan akan diberikan penghargaan dalam bentuk uang, dimulai dari atlet perorangan, atlet ganda pasangan, atlet tiga sampai lima orang atau atlet lebih dari lima orang. (Dennis, 2024) Namun beberapa hambatan muncul dalam proses pemenuhan penghargaan tersebut, permasalahan utama dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berprestasi di Provinsi Banten ini adalah proses penurunan anggaran yang membutuhkan waktu cukup panjang bahkan prosesnya bisa sampai satu tahun atau lebih.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Penelitian ini memiliki kebaruan signifikan karena secara spesifik mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan atlet berprestasi di Provinsi Banten, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung membahas aspek umum kebijakan olahraga, penelitian ini menyoroti dinamika lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan atlet, termasuk alokasi anggaran dan koordinasi lintas lembaga (Fardilah et al., 2024, ; Rahmawati & Handayani, 2023). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi konkret terhadap janji dan pelaksanaan dukungan pemerintah pasca-Undang-Undang Keolahragaan terbaru, mengingat masih banyak atlet berprestasi yang hak-haknya belum terpenuhi secara optimal, khususnya di tingkat daerah (Setiawan & Permana, 2022). Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Banten dalam memenuhi kesejahteraan atlet berprestasi, menganalisis hambatan yang muncul, serta merumuskan solusi strategis guna memastikan implementasi kebijakan yang lebih konsisten dan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode hukum empiris yang berupaya memahami hukum dalam konteks fungsionalnya di masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk mengeksplorasi isu tanggung jawab pemerintah daerah secara faktual. Spesifikasi penelitian ini adalah kualitatif, yang berfokus pada fenomena alamiah dan gejala yang terjadi di lapangan. Sebagai pendekatan naturalistik, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami kompleksitas pengalaman dan persepsi tanpa manipulasi variabel (Abdussamad, 2022). Pemilihan metode ini sejalan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan atlet.

Populasi dan Teknik Sampel

Meskipun bagian ini tidak secara eksplisit menyebutkan populasi dan sampel spesifik, sebagai penelitian hukum empiris kualitatif, diasumsikan bahwa informan kunci

akan dipilih dari pihak-pihak terkait. Informasi mengenai populasi dan teknik sampel akan lebih tepat jika disertakan dalam bagian ini. Namun, berdasarkan karakteristik penelitian, kemungkinan besar penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan dan praktik terkait kesejahteraan atlet di Provinsi Banten, seperti perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Banten, serta atlet dan mantan atlet berprestasi.

Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui dua metode utama: Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Penelitian Lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari sumber primer di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten serta Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini kemungkinan besar meliputi wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan untuk menggali informasi tentang tanggung jawab, kendala, dan solusi yang ada. Selain itu, observasi partisipatif atau non-partisipatif juga dapat digunakan untuk mengamati proses dan implementasi kebijakan di lapangan. Untuk Penelitian Kepustakaan, peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023, serta laporan dan publikasi terkait lainnya (Ramadhan, 2021). Kombinasi kedua metode ini akan memberikan gambaran komprehensif dari data primer dan sekunder untuk mendukung analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data akan melibatkan proses identifikasi tema-tema kunci, pola, dan hubungan antar data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian dokumen. Peneliti akan melakukan interpretasi mendalam terhadap data untuk memahami bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah diimplementasikan, apa saja hambatan yang muncul, dan bagaimana solusi dapat dirumuskan. Pendekatan analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

menyajikan gambaran yang kaya dan nuansa tentang pemenuhan kesejahteraan atlet di Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Olahraga adalah semua aspek yang berkaitan dengan olahraga, peraturan, pendidikan, pelatihan, arah, pengembangan, peningkatan, pemantauan dan evaluasi. (Undang-undang No 11 Tahun 2022) Olahraga adalah salah satu kegiatan yang memiliki dampak positif yang signifikan pada pengembangan dan kinerja atlet. Partisipasi dalam gerakan memiliki pengaruh fisik, mental, emosional dan sosial juga. Atlet yang kompetitif adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak aspek kehidupan. Atlet berprestasi adalah aset berharga bagi wilayah dan negara. Pelatihan Atlet dilakukan secara sistematis mengikuti praktik, dengan pola manajemen yang menyentuh kualitas, dan sistem yang berstandar "profesional" dan melibatkan kesadaran tinggi tentang makna pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan aspek kompetitif secara profesional. (Komarudin dan Hadi, 2019) Keberhasilannya tidak hanya dengan bangga menciptakan nama negara, tetapi juga mendorong generasi muda untuk menjadi aktif dalam olahraga. Pemerintah daerah memainkan peran penting yang tidak dapat diabaikan untuk mendukung layanan. Ini memperkenalkan beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah untuk dukungan terbaik bagi para atlet yang sangat baik.

Prestasi olahraga negara dapat menjadi standar untuk kemajuan peradaban, kekuasaan, kehormatan, dan kesejahteraan nasional. Pengembangan layanan olahraga dilakukan dan diarahkan untuk mencapai kesuksesan di tingkat regional dan internasional. (Junaidi, 2021) Pengembangan dunia olahraga saat ini meningkat pesat, terutama di bidang pemberdayaan olahraga. Pemberdayaan olahraga adalah faktor yang sangat penting untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan kinerja olahraga, karena pengembangan dunia olahraga tergantung pada pengembangan pelatihan tingkat komunitas, sekolah, dan tingkat lokal, juga internasional. (Pratama, dkk, 2019) Penghargaan atlet yang berprestasi adalah dukungan yang sangat penting. Atlet yang telah mencapai kesuksesan di tingkat nasional dan internasional layak untuk diapresiasi atas kerja keras dan komitmen mereka. Penghargaan ini dapat dibuat dalam bentuk medali, sertifikat, bonus, beasiswa pendidikan, atau bentuk penghargaan lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf (j) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian

6 Penghargaan Olahraga, penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, Lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga salah satunya adalah berbentuk kesejahteraan. Pemenuhan kesejahteraan atlet adalah tanggung jawab penuh pemerintah dan disalurkan melalui induk organisasi olahraga. (Pranoto, dkk., 2021)

13 Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai Koni, adalah organisasi Atau sebuah forum pemberdayaan olahraga untuk meningkatkan keberhasilan bangsa Indonesia, dan mengharuskan memenuhi tugas serta memiliki manajemen yang efektif. Dengan kata lain, ada Koni sebagai organisasi mandiri, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Koni adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh organisasi industri olahraga induk dan berkonsentrasi pada pengelolaan pengembangan olahraga dan daya saing yang ada di tingkat nasional, di suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota. Tantangan utama pendirian Koni adalah perencanaan, koordinasi, dan implementasi arah dan peningkatan potensial atlet, wasit, pelatih dan manajer untuk mencapai prestasi keolahragaan nasional. (Siregar, 2018) Pemerintah provinsi banten menggunakan APBD untuk kegiatan keolahragaan termasuk untuk memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi baik tingkat nasional ataupun internasional. Alokasi anggaran olahraga di APBD digunakan untuk mendanai nomor olahraga lokal seperti membangun dan memelihara fasilitas olahraga lokal, melatih atlet lokal, dan mengadakan kompetisi olahraga di tingkat lokal.

29 Pemerintah daerah provinsi banten memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan atlet. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari menyediakan fasilitas olahraga hingga menyediakan program pelatihan yang tepat dan memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada para atlet. Pemerintah daerah banten mengatakan meningkatnya prestasi olahraga ini menjadikan banten sebagai provinsi yang terkenal berpotensi di bidang olahraga dan sebagai salah satu faktor bahan promosi provinsi yang unggul. (Sanajya, 2025) Penghargaan olahraga dapat berupa kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat, kesejahteraan atau jenis penghargaan lain. Namun, di provinsi banten jenis penghargaan yang diberikan kepada atlet berprestasi umumnya dalam bentuk uang yang dimana sudah dianggarkan dalam

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Standar Harga Satuan Provinsi Banten dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023. (Sanjaya, 2025)

Provinsi banten meraih peringkat ke-11 nasional pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON XXI) 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah pada 9-20 September 2024 lalu dengan perolehan medali 21 Emas, 24 Perak dan 33 Perunggu. Artinya banten tetap bisa mempertahankan prestasinya di PON sama seperti yang terjadi pada PON 2020 di papua banten juga menduduki peringkat ke-11 nasional. Dari perspektif dukungan keuangan, pemerintah daerah Banten sudah memberikan insentif atau dukungan keuangan untuk atlet yang sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini dapat membantu atlet fokus pada pelatihan dan persaingan tanpa membebani masalah keuangan, tidak hanya dalam bentuk harga pasca-laba, tetapi juga dalam bentuk beasiswa dan biaya hidup. Selain aspek fisik dan keuangan, atlet juga mencakup aspek sosial dan psikologis. Pemerintah daerah juga memperhatikan keseimbangan kehidupan atlet dengan memberi mereka cukup waktu untuk tenang, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Perkembangan mental sangat penting untuk membantu atlet tidak hanya disiapkan secara fisik, tetapi juga untuk mengatasi tekanan yang sering muncul di dunia olahraga. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung pengembangan program psikologi olahraga yang dapat membantu atlet menangani persaingan dan menjaga kesehatan intelektual.

Provinsi banten sangat mengapresiasi keberhasilan yang diraih oleh atlet-atlet kebanggaan daerah yang dibuktikan dengan pemberian bonus terhadap atlet berprestasi. Teknis penyaluran penghargaan terhadap atlet berprestasi di provinsi banten khususnya PON 2024 diberikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Penghargaan diberikan pada malam penganugerahan dalam rangka HUT Ke-24 Provinsi Banten, di Plaza DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat 25 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB. (Sanjaya, 2025) Tanggung jawab pemerintah daerah juga sangat penting bagi prestasi atlet yang sangat baik. Atlet yang membawa kebanggaan dan pengakuan kepada komunitas mereka harus menerima perlakuan yang adil dan dukungan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk mendukung atlet dengan benar sehingga mereka dapat terus menekankan dan menginspirasi kaum muda.

52 Selain tanggung jawab hukum dan moral, pemerintah daerah juga mengambil tanggung jawab sosial atas kehadiran prestasi atlet. Pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan olahraga dengan menyediakan lembaga yang tepat, program pelatihan berkualitas dan penghargaan kepada atlet yang luar biasa. Ini akan membantu menciptakan komunitas yang sehat dan aktif di Banten. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian penting dari memenuhi kehadiran kesejahteraan atlet oleh pemerintah daerah. Dukungan keuangan seperti beasiswa dan penghargaan dapat membantu atlet fokus pada pelatihan dan kompetisi tanpa khawatir tentang biaya hidup. Berinvestasi dalam kesejahteraan atlet dapat memiliki efek positif pada ekonomi lokal melalui peningkatan pendanaan olahraga dan pariwisata. (Hidayat, dkk., 2025)

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa atlet memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka atas kesejahteraannya. Ini termasuk pemantauan dan penilaian program yang diterapkan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Koni, lembaga pendidikan dan sektor swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat membantu atlet dengan dukungan optimal untuk pengembangan olahraga di Banten.

51 Pemerintah provinsi banten memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan atlet berprestasi walaupun sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku namun berbagai hambatan masih menghalangi pemenuhan kebutuhan mereka. Salah satu hambatan utama adalah batas anggaran yang dialokasikan untuk departemen olahraga. Karena anggaran yang terbatas, sulit bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang tepat, menerapkan program pelatihan intensif dan memberikan kepada atlet yang sangat baik. Ini tentu saja mempengaruhi kualitas pelatih dan kesejahteraan atlet jangka Panjang. Prioritas anggaran juga merupakan masalah utama. APBD di Provinsi Banten memiliki berbagai sektor yang membutuhkan perhatian, termasuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sektor olahraga sering harus bersaing dengan sektor lain yang dianggap sebagai sektor darurat. Akibatnya, anggaran untuk pengembangan atlet yang luar biasa seringkali tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hal pelatihan, penghargaan kelembagaan dan keuangan. Selanjutnya, kurangnya fasilitas olahraga yang memadai di Banten adalah hambatan yang signifikan bagi pengembangan atlet. Beberapa area Banten masih tidak memiliki fasilitas olahraga

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

yang representatif untuk mendukung pelatihan olahraga. (Rahayu, 2025) Tanpa lembaga yang masuk akal, atlet tidak dapat berolahraga sepenuhnya. Ini akan mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai pada akhirnya. Juga, fasilitas terbatas menyulitkan atlet untuk berlatih secara profesional dan memblokir kemungkinan pengembangan lebih lanjut. (Sanjaya, 2025)

Ketidakkonsistenan dalam menawarkan insentif dan penghargaan juga merupakan masalah bagi para atlet hebat. Banyak atlet telah mencapai hasil yang hebat, tetapi insentif dan penghargaan yang mereka terima tidak selalu layak untuk usaha dan kesuksesan. Atlet membutuhkan dukungan fisik dalam bentuk fasilitas dan pelatihan, serta perlu juga diperhatikan pentingnya pemenuhan makanan dan vitamin yang sesuai dengan kebutuhan atlet. Banyak atlet mengalami tekanan psikologis yang tinggi dalam kompetisi dan kehidupan sehari-hari. Namun, sementara dukungan untuk kesehatan mental atlet di Banten State masih terbatas, ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka bersaing dengan mentalitas yang kuat dan stabil. Hambatan yang dirasakan mungkin juga mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan di luar dunia olahraga. Banyak atlet yang percaya bahwa pemerintah hanya fokus pada hasil jangka pendek dan bukan pada masa depan mereka setelah pensiun. Akibatnya, para atlet kerap kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di luar lapangan pertandingan.

Di sisi lain, rumitnya birokrasi dalam mengakses dukungan atau fasilitas tertentu juga menjadi keluhan. Misalnya, beberapa atlet merasa bahwa proses pengajuan pendanaan atau fasilitas terlalu rumit, mengurangi efisiensi, dan menghambat persiapan mereka untuk bertanding. Hal ini bisa menjadi beban tambahan, terutama bagi atlet yang fokus pada latihan intensif. Aspek lainnya adalah komunikasi antara pemerintah dan atlet mungkin terasa kurang terbuka. Atlet seringkali tidak diajak berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang menyentuh kehidupannya, sehingga merasa keinginannya tidak didengarkan. (Yonathan dan Bima, 2023)

Pemerintah Provinsi Banten harus menerapkan berbagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan atlet yang baik. Salah satu kemungkinan adalah meningkatkan anggaran untuk sektor olahraga untuk memungkinkan pengembangan atlet dan pengembangan diterapkan secara lebih optimal. Alokasi anggaran yang masuk akal memungkinkan untuk

fasilitas olahraga yang lebih baik dan kualitas pelatihan atlet. Selain itu, ada insentif dan peningkatan penghargaan yang lebih konsisten dan sepadan jika layanan yang dicapai atlet termotivasi untuk melanjutkan di luar mereka. Pemerintah daerah juga dapat menciptakan program pendidikan dan pelatihan terpadu. Ini memungkinkan atlet untuk bermain olahraga secara akademis dan bersamaan.

Pemerintah dapat menawarkan Program Beasiswa Pendidikan. Ini memungkinkan untuk memberikan kompensasi karir olahraga dengan pendidikan yang tepat dan mempersiapkan masa depan setelah menarik diri dari dunia olahraga. Selain itu, Dukungan Kesehatan lebih komprehensif dalam bidang medis dan mental, memastikan bahwa atlet tetap dalam kondisi yang optimal. Sementara itu, penggunaan teknologi dalam pelatihan dan pemantauan pengembangan atlet adalah solusi yang efektif untuk memastikan pembinaan yang lebih bertarget. Untuk lebih memaksimalkan potensi atlet, pemerintah daerah akan mengembangkan program pelatihan berbasis teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak dan peralatan pelatihan yang sangat berkembang, untuk meningkatkan kemampuan atlet secara lebih efektif. Semua solusi ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan atlet berbakat di Banten. Untuk menjamin keberlanjutan program yang berfokus pada kesejahteraan atlet, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta sangat penting. Strategi ini juga dapat membantu menjembatani kesenjangan terkait ketersediaan pelatihan dan fasilitas.

Singkatnya, peran pemerintah daerah dalam memastikan kesejahteraan atlet sangat penting untuk membina masyarakat yang sejahtera. Dengan menganut prinsip-prinsip teori kesejahteraan, pemerintah dapat menjamin bahwa atlet tidak hanya memperoleh dukungan yang diperlukan untuk prestasi mereka tetapi juga merasa dihargai sebagai anggota penting masyarakat mereka. Pendekatan ini pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi secara keseluruhan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki tanggung jawab penuh dalam mendukung kesejahteraan atlet berprestasi, mencakup penyediaan fasilitas, program pelatihan yang tepat, serta dukungan

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Olahraga

finansial dan non-finansial. Temuan utama menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kesejahteraan atlet di Provinsi Banten telah dilakukan, salah satunya melalui pemberian penghargaan dalam bentuk uang yang diatur dalam Standar Harga Satuan Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab ini masih dihadapkan pada beberapa keterbatasan yang signifikan. Hambatan utama meliputi minimnya alokasi anggaran untuk bidang olahraga, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemberian insentif; kurangnya koordinasi antar lembaga yang mengakibatkan program tidak berjalan optimal; serta belum adanya *sport therapist* khusus atlet yang krusial untuk dukungan fisik dan mental. Selain itu, rumitnya birokrasi dalam akses dukungan dan kurangnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan atlet juga menjadi poin penting yang menghambat efektivitas program kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu memastikan penegakan peraturan yang konsisten, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, meningkatkan alokasi anggaran, serta mengembangkan program terpadu seperti beasiswa pendidikan dan dukungan kesehatan komprehensif, termasuk psikologi olahraga, serta memanfaatkan teknologi dalam pembinaan atlet. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur dampak finansial dan non-finansial dari kebijakan kesejahteraan atlet, serta memperluas cakupan sampel ke lebih banyak jenis atlet dan mantan atlet untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam terkait implementasi kebijakan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai efektivitas kebijakan serta implikasinya terhadap keberlanjutan karier atlet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Armand, F. (2003). *Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis*. Occasional Paper Series. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Belair, A. R. (2003). *Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem*. Dissertation. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.¹
- Chain, P. (1997). *Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE*

- Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.s2win.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Dennis, A. (2024). *Bupati Janjikan Bonus Bagi Atlet Berprestasi di PON XXI*. (Tidak diterbitkan).
- Fardilah, F. A., Syafrinal, S., & Harimurti, I. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Hukum*, 7(1), 622–633. <https://doi.org/10.37081/jpph.v7i1.622>
- Hidayat, M. I., Wulandari, R., & Permana, D. (2025). *Dampak Investasi Olahraga terhadap Perekonomian Lokal*. (Tidak diterbitkan).
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Junaidi, M. (2021). *Pembangunan Olahraga Nasional dan Internasional*. (Tidak diterbitkan).
- Komarudin, K., & Hadi, A. (2019). *Manajemen Pelatihan Atlet Profesional*. Media Pressindo.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Lindawati (2015). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.
- LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.
- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).
- Pranoto, E., Wibowo, S., & Cahyono, B. (2021). *Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet*. Pustaka Media.
- Pratama, A., Setyawan, R., & Putra, R. (2019). *Pemberdayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi*. Penerbit Olahraga Indonesia.
- Rahayu, S. (2025). *Ketersediaan Fasilitas Olahraga di Banten: Tantangan dan Harapan*. (Tidak diterbitkan).
- Rahmawati, R., & Handayani, R. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Prestasi. *Jurnal Administrasi Hukum*, 3(1), 352–365. <https://doi.org/10.29303/jarrah.v3i1.352>
- Ramadhan, M. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Provinsi Banten Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

- Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Sanjaya, W. (2025). *Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2023: Standar Harga Satuan Penghargaan Atlet*. (Tidak diterbitkan).
- Setiawan, D., & Permana, A. (2022). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Atlet Berprestasi di Daerah. *Jurnal Hukum*, 26(1), 1-15. <https://doi.org/10.24843/JH.2022.v26.i01.p01>
- Siregar, H. (2018). *Peran KONI dalam Pembinaan Olahraga Nasional*. Pustaka Jaya.
- Soemarsono, M. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grasindo.
- StatSoft, Inc. (1997). *Electronic Statistic Textbook*. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- Undang-undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Wicaksono, A. (2022). *Penghargaan Olahraga dan Kesejahteraan Atlet*. Penerbit Abadi.
- Yonathan, R., & Bima, P. (2023). *Keterlibatan Atlet dalam Proses Kebijakan Olahraga*. (Tidak diterbitkan).
- Zufri, M., & Jaluanto, S. (2018). *Problematika Kesejahteraan Atlet di Indonesia*. Pustaka Insan.